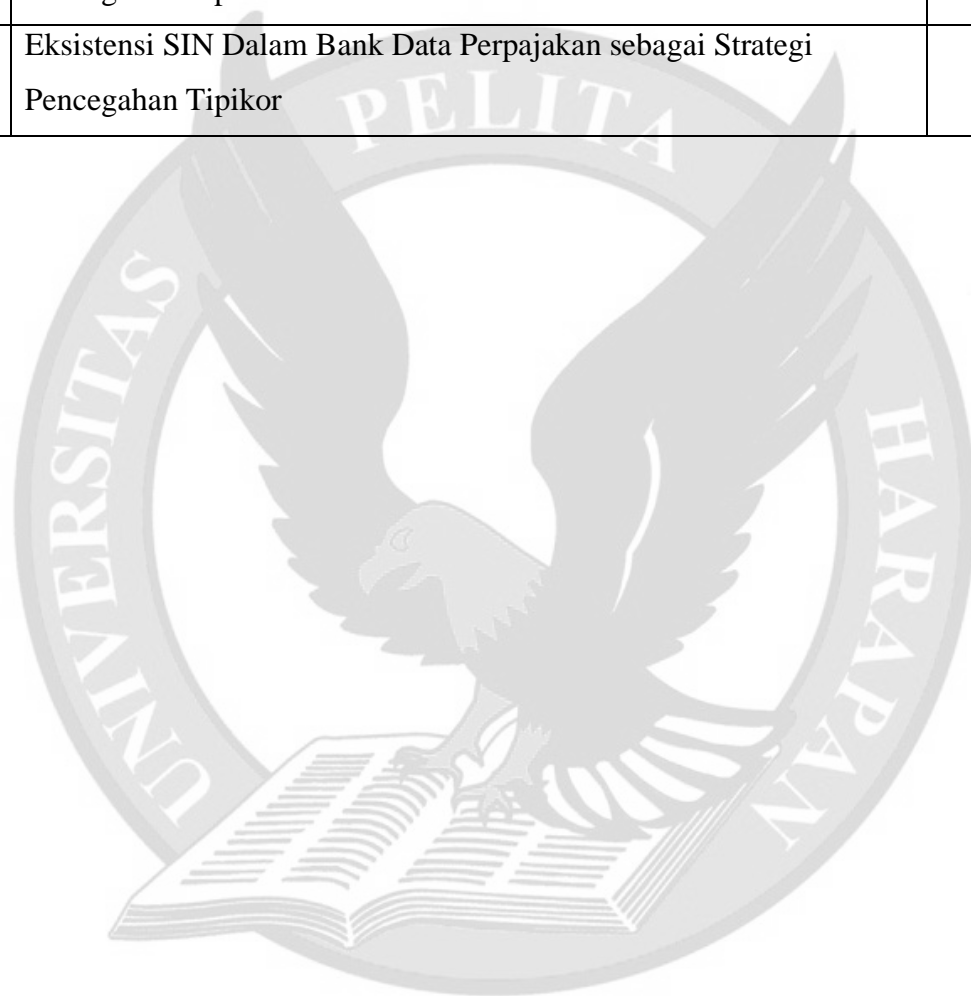


DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan	Halaman
1.1	Skema SIN sebagai Pencegahan Tipikor	23
2.1	Bank Data Perpajakan sebagai wujud Reformasi Pajak	56
2.2	Kepemilikan Identitas Nomor Unik di Indonesia	57
4.1	Kebijakan Pendukung Lainnya yang Ditempuh Dalam bidang PPh yaitu “pengembangan sistem informasi dan monitoring perpajakan yang terintegrasi dan on-line antar unit-unit terkait.”	88
4.2	Dasar Pemberlakuan SIN menurut Pasal 35A UU No. 28 Tahun 2007	95
4.3	Kewenangan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan	100
4.4	SIN dalam 2 (dua) CARD yang Berbeda	105
4.5.1	Beberapa Contoh Identitas dari Beberapa Institusi	110
4.5.2	Replika Identitas dengan Nomor Tunggal	111
4.5.3	Replika Alamat yang Sama dalam Identitas dengan Nomor Tunggal	111
4.6	Bank Data Nasional yang Terintegrasi	112
4.7	Kelemahan Sistem Sel Assessment Pajak	115
4.8	Akses Penghambat untuk Pajak	126
4.9	4 (empat) Model Kebijakan dalam Pengelolaan Digital ID	131
4.10	Bank Data Perpajakan	177
4.11	SIN: <i>Link and Match</i> Data Financial dan Non-Financial	178
4.12	Pencapaian e-Audit Pajak	181
4.13	Konsep SIN dalam Bank Data Perpajakan sebagai Pencegahan Tipikor	186
4.14	Kawat Diplomatik Rahasia berkode JAKARTA 00005420 001.2 OF 004	262
4.15	Kelemahan Direktorat Jenderal Pajak	266
4.16	Kebijakan Sunset Policy Diduga Bertentangan dengan UU KUP Pasal 37A	275

4.17	Usulan Presiden RI tentang DJP menjadi Kementerian	278
4.18	Milestone Pengembangan Sistem Informasi di Dirjen Jendral Pajak	279
4.19	Kewajiban Pengisian SPT dengan Benar, Lengkap dan Jelas	286
4.20	Super Big Data	292
4.21	Data Pihak Ketiga Secara Otomatis Masuk ke Pusat Data Pajak	294
4.22	Menghapus Korupsi Secara Sistemik	295
4.23	Peran SIN Dalam Bank Data Perpajakan Sebagai Strategi Pencegahan Tipikor	297
4.24	Eksistensi SIN Dalam Bank Data Perpajakan sebagai Strategi Pencegahan Tipikor	299



DAFTAR TABEL

No	Keterangan	Halaman
4.1	Perbedaan <i>Self-Assessment</i> dengan <i>Official Assessment</i>	114
4.2	Area Rawan Korupsi Perpajakan Tahun 2012	124
4.3	Perbandingan Antar Negara Penggunaan QAA	134
4.4	Variable SIN antara Uni Eropa dan Indonesia	134
4.5	Sanksi Administrasi dalam UU KUP	143
4.6	Sanksi Denda dalam UU KUP	144
4.7	Sanksi Kenaikan dalam UU KUP	145
4.8	Sanksi Pidana dalam UU KUP	146
4.9	Daftar <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)	200
4.10	Pemenuhan Kewajiban Perpajakan CV. Prima Alam Sejahtera	234
4.11	Pembayaran Pajak oleh WP CV Prima Alam Sejahtera	238
4.12	Kerugian Negara atas Laporan Pajak Fiktif CV Prima Alam Sejahtera	239
4.13	Matrik Visi & Misi Grand Design & Blue Print DJP 2001 - 2010	257
4.14	Milestone Pengembangan Sistem Informasi di Dirjen Jendral Pajak	275
4.15	Realisasi Penerimaan Pajak 2017 - 2020	285

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Lembar Pernyataan Keaslian Disertasi

Lembar Pengesahan Promotor dan Co Promotor

Abstrak

Kata Pengantar

Daftar Gambar dan Daftar Tabel

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah.....	1
1.2	Rumusan Masalah.....	26
1.3	Tujuan Penelitian.....	27
1.4	Manfaat Penelitian.....	27
1.5	Sistematika Penulisan.....	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Landasan Teori	
2.1.1	Teori Kewenangan Negara	30
2.1.2	Teori <i>Law as a Tool of Social Engineering</i>	36
2.1.3	Teori Hukum Progresif.....	46
2.2	Landasan Konseptual	
2.2.1	Bank Data Perpajakan.....	53
2.2.2	Identitas.....	57
2.2.3	Pendaftaran penduduk.....	58
2.2.4	Berbagai entity/data personal.....	59
2.2.5	Sistem menejemen identitas tradisional.....	59
2.2.6	Nomor induk keluarga.....	60
2.2.7	Digital divide.....	61
2.2.8	Mengatur identitas.....	61
2.2.9	SIN di sektor perpajakan.....	62

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	63
3.2	Jenis Data.....	64
3.3	Cara Perolehan Data.....	67
3.4	Pendekatan Penelitian.....	68
3.5	Analisa Data.....	71

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA

4.1	Pengaturan <i>Single Identity Number</i> Sebagai Sistem Menejemen Informasi Perpajakan Di Indonesia.....	73
4.1.1	Dasar Hukum <i>Single Identity Number</i> sebagai Sistem Informasi di Bidang Perpajakan.....	73
4.1.2	SIN sebagai Bagian Integral dalam Sistem Informasi dan Bank Data Perpajakan.....	102
4.1.3	SIN pada Bank Data Perpajakan dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi.....	117
4.1.4	Ketentuan Internasional tentang SIN sebagai sebuah Sistem Informasi Perpajakan.....	126
4.1.4.1	<i>United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)</i>	127
4.1.4.2	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)</i>	130
4.1.5	Perbandingan Pengaturan SIN di negara lain.....	136
4.1.6	Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Terkait Bidang Perpajakan.....	143
4.2	Implementasi SIN Sebagai Bagian Dari Bank Data Perpajakan dan Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	154
4.2.1	Fenomena Tindak Pidana Korupsi Sektor Perpajakan di Indonesia.....	154
4.2.2	SIN dalam Bank Data Perpajakan sebagai Strategi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	168
4.2.3	Implementasi SIN dalam Bank Data Perpajakan sebagai Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	197
4.2.4	Beberapa Putusan Pengadilan tentang Penyalahgunaan Kewenangan di Bidang Perpajakan.....	209

4.2.4.1	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel.....	210
4.2.4.2	Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Skt, tanggal 11 April 2018 <i>Juncto</i> Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 141/Pid.Sus/2018/PT SMG, tanggal 2 Juli 2018 <i>Juncto</i> Putusan Mahkamah Agung Nomor 232K/Pid.Sus/2019, tanggal 25 Maret 2020.....	218
4.2.4.3	Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 87/Pd.Sus/2016/PN Ptk. tanggal 19 April 2016 <i>Juncto</i> Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.: 55/PID.SUS/2016/PT PTK tanggal 28 Juni 2016 <i>Juncto</i> Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1806 K/PID.SUS/2016 tanggal 23 November 2016.....	221
4.2.4.4	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2016 <i>Juncto</i> Putusan Mahkamah Agung Nomor 2628 K/Pid.Sus/2016.....	226
4.2.4.5	Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perpajakan), tanggal 24 September 201 <i>juncto</i> Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 109/PID.SUS/2019/PT.YYK tanggal 9 Januari 2020.....	232
4.2.5	Perbandingan Kasus-Kasus Korupsi Perpajakan di Luar Negeri.....	246
4.2.5.1	Kasus Korupsi Perpajakan di Amerika Serikat.....	246
4.2.5.2	Kasus Korupsi Perpajakan di Negara Jepang.....	247
4.2.6	Evaluasi Implementasi dan Pembelajaran yang Relevan.....	249
4.3	Eksistensi SIN dalam Bank Data Perpajakan yang Ideal sebagai Bagian dari Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	251
4.3.1	Kelemahan Pengaturan SIN sebagai bagian dari Bank Data Perpajakan...	251
4.3.2	Inkonsistensi dan Ketidakefektifan SIN sebagai Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	268
4.3.2.1	Temuan Inkonsistensi Pengaturan.....	282

4.3.2.2	Temuan Ketidakefektifan SIN sebagai Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	284
4.3.3	Penguatan Pengaturan SIN sebagai Bagian Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	284

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	301
5.2	Saran.....	306

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Pencatatan Ciptaan No. EC00201933068, tertanggal 16 Maret 2019 dan Surat Pencatatan Ciptaan No. EC00201938491, tertanggal 22 April 2019.
2. Pidato Penulis sebagai Ketua BPK RI di 68th Session of the United Nations General Assembly, New York, 20 November 2013.
3. Letter of Acceptance Artikel Jurnal Utopia y Praxis Latinoamericana will be publish in the Vol. 26, No. 92, 2021.
Article Journal International

RIWAYAT HIDUP